

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP) PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**AS ALUKAL ISMAH
15332 / 2009**

**PROGRAM STUDI D.III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH (SPIP) PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : As Alukal Ismah
NIM : 15332
Program Studi : D.III
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 28 Januari 2013

Diketahui Oleh
Ketua Prodi



Perengki Susanto, SE, M.Sc
Nip : 19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh
Pembimbing



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
Nip : 19710302 199802 2 001


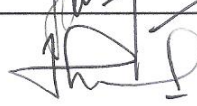

PENGESAHAN TUGAS AKHIR**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
(SPIP) PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : As Alukal Ismah
NIM : 15332
Program Studi : Akuntansi (D.III)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Akuntansi (D.III) Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 15 Januari 2013

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
Sekretaris	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	
Anggota	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : As Alukal Ismah

Tahun masuk/NIM : 2009 / 15332

Tempat/tanggal lahir : Padang / 08 Agustus 1991

Program Studi : DIII Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jalan Parak Salai II No. 14 Jati, Padang

Judul Tugas Akhir : Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

No HP : 085375566291

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 28 Januari 2013

Yang menyatakan,



As Alukal Ismah

NIM. 15332

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT dan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW atas berkat rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga dapat penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan baik.

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tak lupa penulis sampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan teriring do'a dan semoga Allah SWT memberi petunjuk dan balasan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa memberikan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bantuan dalam penyelesaian urusan akademik penulis.

5. Bapak Editiawarman, ST, selaku Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Ibu Reni Susanti, S.Pt, MP , selaku staf Bagian Umum dan Kepegawaian atas kerja sama dan bantuan yang telah diberikan selama penelitian.
7. Kedua Orangtua penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Padang, 28 Januari 2013

Penulis

ABSTRAK

As Alukal Ismah : Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang yang menurut Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009, menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan SPIP. Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pilot proyek implementasi sistem pengendalian internal pemerintah di Kota Padang.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif dengan melakukan wawancara dan menyebarkan angket kuesioner kepada sejumlah staf Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari hasil wawancara dan kuesioner tersebut, penulis akan menghitung persentase tingkat efektivitas SPIP dengan cara membandingkan skor empiris dengan skor ideal, yang kemudian akan dibandingkan dengan implementasi SPIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Berdasarkan wawancara diperoleh kesimpulan bahwa implementasi SPIP di DPKD hingga saat ini masih berada pada tahap pemetaan (*diagnostic assessment*). Dan berdasarkan pengolahan data hasil kuesioner diperoleh hasil tingkat efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah pada DPKD sebesar 80,83% dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Unsur pemantauan memperoleh skor tertinggi yaitu 85,00%, sedangkan unsur kegiatan pengendalian memperoleh skor terendah yaitu 77,42%.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. LANDASAN TEORI.....	9
A. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).....	9
1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	9
2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	11
3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	12
4. Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP.....	20
5. Faktor-faktor keberhasilan penerapan SPIP.....	21
6. Proses penyelenggaraan SPIP.....	23

B. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	23
1. Pengertian Efektivitas.....	23
2. Mengukur Efektivitas SPIP.....	24
BAB III. PENDEKATAN PENELITIAN.....	25
A. Bentuk Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Desain Penelitian.....	26
1. Teknik Penelitian.....	27
2. Sumber Data.....	30
3. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
1. Sejarah DPKD.....	33
2. Tujuan DPKD.....	33
3. Program Kerja DPKD.....	34
4. Struktur Organisasi DPKD.....	35
5. Uraian Tugas DPKD.....	36
B. Hasil Penelitian.....	38
1. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	38
2. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	40

C. Pembahasan.....	46
1. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	46
2. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	47
BAB V. PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

1. Struktur Organisasi DPKD Provinsi Sumbar.....35

DAFTAR TABEL

Tabel :

1. Kisi-kisi Angket Untuk Mengukur Efektivitas SPIP.....	27
2. Pernyataan Positif	28
3. Populasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	29
4. Jumlah Sampel Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	30
5. Penentuan Kriteria Efektivitas SPIP.....	32
6. Hasil Angket SPIP atas Lingkungan Pengendalian.....	40
7. Hasil Angket SPIP atas Penilaian Risiko.....	41
8. Hasil Angket SPIP atas Kegiatan Pengendalian.....	42
9. Hasil Angket SPIP atas Informasi dan Komunikasi.....	43
10. Hasil Angket SPIP atas Pemantauan.....	44
11. Rekapitulasi Hasil Efektivitas SPIP di DPKD.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi baik perusahaan-perusahaan bisnis maupun instansi pemerintahan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2001).

Sistem pengendalian internal (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).

Sistem pengendalian internal dalam penerapannya harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah juga dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki arti yang sangat penting bagi organisasi khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena merupakan pintu awal upaya pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan anggaran pemerintah.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka SPIP merupakan pilar yang sangat penting untuk dibangun dan diterapkan segenap jajaran aparatur pemerintah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan menerapkan SPIP, pemerintah daerah juga akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Sistem pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah dikenal sebagai suatu sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintahan dapat mencapai tujuannya

secara efisien dan efektif, dimana pengelolaan keuangan Negara dapat dilaporkan secara andal, asset negara dapat dikelola dengan aman, dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengingat begitu penting dan strategisnya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk menerapkan SPIP tersebut, agar mempercepat terciptanya *good and clean government* di Provinsi Sumatera Barat. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam peraturan gubernur tersebut dijelaskan bahwa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disingkat SPIPP adalah sistem pengendalian internal pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Kepala Puslitbangwas BPKP/Ketua Koordinator Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan penda pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan kepala daerah tentang Penyelenggaraan SPIP. Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur : lingkungan pengendalian, penilaian

resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internal.

Ketentuan tersebut telah menandai secara yuridis formal, bahwa masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah wajib mengimplementasikan kelima unsur SPIP tersebut dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari. Termasuk juga Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintah Provinsi dalam urusan pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari dua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai uji coba implementasi SPIP pada tahap awal. Sebagai pilot proyek dari pengembangan SPIP di Provinsi Sumatera Barat, maka seluruh Pejabat Eselon II, III dan IV telah mengikuti sosialisasi dan workshop yang diadakan tahun 2009 lalu.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien.

Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi. Efektivitas sistem pengendalian internal diartikan sebagai kemampuan sistem pengendalian internal yang direncanakan dan diterapkan agar mampu mewujudkan tujuannya yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Keberhasilan penerapan SPIP akan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat pengenalan dan pemahaman aparatur terhadap SPIP tersebut. Oleh karena itu, SPIP harus dikenal oleh semua aparatur dengan memberikan sosialisasi dan workshop secara berkesinambungan. Terkait dengan sosialisasi SPIP ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi juga memasukkan materi SPIP sebagai salah satu materi tambahan/penunjang pada setiap kegiatan Diklat.

Mengingat DPKD merupakan dinas provinsi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, maka pimpinan DPKD juga harus melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian internal atas seluruh kegiatan organisasi. Pimpinan DPKD sangat berperan dalam penerapan unsur-unsur SPIP yang

terdapat pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Fenomena yang penulis temui pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh unsur dari sistem pengendalian internal pemerintah sudah diterapkan secara teknis dalam kegiatan sehari-hari. Sementara pedoman teknis yang mengatur SPIP untuk DPKD sendiri hingga saat ini belum disahkan karena masih perlu dikaji ulang. Hal ini tentunya akan melemahkan SPIP tersebut karena pengetahuan pegawai mengenai SPIP akan terbatas. Akibatnya masih banyak pegawai yang belum memahami arti penting dari SPIP tersebut.

Untuk melihat seberapa jauh efektivitas penerapan SPIP di DPKD, penulis akan melakukan observasi dan menyebarkan angket kuesioner yang nantinya akan ditarik kesimpulan dengan merumuskan secara deskriptif persentase. Penulis akan memberikan gambaran berupa tingkat persentase dari jawaban responden dengan cara membandingkan skor empiris dengan atau skor ideal sehingga didapatkan tingkat keberhasilan yang dicapai (Ali 1982).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap SPIP yang diterapkan dengan menggunakan daftar uji pengendalian internal yang terlampir pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan perumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat?”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa kajian masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat?
2. Seberapa besar tingkat efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka penelitian tugas akhir ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Proses penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Tingkat efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tugas akhir ini mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian tugas akhir ini akan menambah pengetahuan penulis mengenai sistem pengendalian internal pemerintah yang diterapkan pada instansi pemerintahan.
2. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang berguna

untuk peningkatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang lebih efektif di masa mendatang.

3. Bagi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Diploma III Akuntansi, tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk lebih memperkenalkan Program Studi DIII Akuntansi pada masyarakat luas. Selain itu, penelitian tugas akhir ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi generasi selanjutnya terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi mengenai Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah hingga tahun 2012 masih berada pada tahap pemetaan (*diagnostic assessment*). Hal ini menyebabkan belum disahkannya pedoman teknis SPIP untuk DKPD. Sehingga belum seluruh pegawai yang memahami SPIP. Sementara sosialisasi yang dilaksanakan selama ini lebih difokuskan kepada pejabat eselon II, III dan IV sebagai pengambil kebijakan, belum bersifat menyeluruh untuk pegawai DPKD.
2. Secara teknis sistem pengendalian internal pemerintah telah diterapkan dalam seluruh kegiatan rutin pada setiap Bidang/bagian/seksi. Terbukti dari hasil kuesioner dari sejumlah responden yang memperlihatkan tingkat efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah mencapai rata-rata 80,83% dan termasuk dalam kategori sangat efektif.
3. Jika dilihat dari masing-masing unsur SPIP, unsur pemantauan memperoleh skor tertinggi yaitu 85,00% yang berarti bahwa kegiatan pemantauan telah dijalankan dengan sangat efektif oleh pimpinan DPKD. Sedangkan unsur kegiatan pengendalian memperoleh skor terendah yaitu 77,42% yang berarti

bahwa pimpinan DPKD harus lebih memperhatikan sumber daya manusia yakni pegawai yang memiliki arti penting bagi pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Saran

Adapun saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Satuan Pengawas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk segera menyelesaikan pedoman teknis implementasi SPIP dengan melanjutkan tahapan penyelenggaraan hingga tahap *performing*. Setelah pedoman teknis rampung, secepatnya disebarakan ke seluruh komputer DPKD dalam bentuk *soft file*, agar pemahaman seluruh pegawai tentang SPIP bisa lebih memadai.
2. Pimpinan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah baik Kepala Bidang/Bagian/Seksi diharapkan agar lebih memperhatikan sumber daya manusia yakni pegawai DPKD mengingat sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan SPIP, dengan cara memperbaiki kebijakan yang lebih mensejahterakan pegawai.
3. Meskipun SPIP telah diterapkan dalam kegiatan rutin dengan sangat efektif, namun Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan tetap mempertahankan optimalisasi pencapaian kinerja untuk masa yang akan datang agar efektivitas tetap diraih.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad. 1982. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.

BPKP. 2009. *Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. <http://www.bpkp.go.id>. 21 Desember 2012.

Drs. Mardi, MM. (2011). *Mengenal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapannya di Provinsi Sumatera Barat*. <http://www.sumbarprov.go.id>. 20 Desember 2012.

Parno. (2005). *Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Di Kota Semarang*. Skripsi. Semarang. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang “*Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*”.

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 Tentang “*Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*”.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang “*Standar Akuntansi Pemerintahan*”.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Zumriyatun Laila. (2010). *Analisis Penyelenggaraan PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dua Pemda Di Sumatera Barat*. <http://www.pasca.unand.ac.id>. 25 Desember 2012.

Fakultas Ekonomi UNP. 2012. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Diploma III*. UNP.